

MASYARAKAT DAN POLRI: PERSEPSI DAN MISPERSEPSI



OLEH: INDRIA SAMEGO

ADA pengakuan jujur bahwa program membangun kepercayaan (Trust Building) yang menjadi salah satu strategi besar (Grand Strategies) Polri, masih menyisakan ketidakpuasan. Meski berbagai upaya reformasi birokrasi, Perpolisian Masyarakat (Community Policing), pelayanan cepat (Quick Wins) Polri dikedepankan, mulai dari pelayanan cepat dalam pengurusan STNK, SIM, transparansi dalam rekrutmen dan penyidikan, masyarakat masih menganggap Polri belum berhasil membangun dirinya sebagai civilian police. Apalagi gara-gara kasus pertentangan "Cicak vs Buaya", kemudian pro dan kontra dalam menanggapi sikap mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji, keberhasilan Polri dalam mengungkap kelompok teroris jadi dilupakan. Bahkan, belakangan, bersamaan dengan HUT Polda Metro, ada berita buruk tentang penangkapan seorang aktivis yang diikuti dengan penganiayaan di jajaran Polsek Beji, Depok. Alih-alih kado HUT yang diterima, justru sebaliknya, citra Polri yang makin terperosok. Polri yang arogan, menjadi perspsi public di samping Polri yang korup. Penelitian yang dilakukan Litbang

Polri, menjadi bukti lain dari kegetiran di atas. Sebagaimana dilaporkan dalam penelitiannya, ternyata, Trust Building makin jauh dari persepsi masyarakat terhadap Polri. Bahkan, Ketua Dewan Penasihat Ahli Polri, Jenderal Pol (Purn.) Prof Dr. Awaloedin Djamin pun mengingatkan soal ini dalam sebuah kesempatan.

Yang menjadi masalah: 1. Mengapa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan Polri masih rendah. 2. Bagaimana Peran Polri dalam mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Polri. 3. Apa strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri?

Uraian berikut ini, akan secara lebih rinci menyoroti ketiga pertanyaan di atas.

RENDAHNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat kurang percaya terhadap Polri. Pertama, secara umum, sebagaimana diyakini oleh para peneliti kebijakan public di Negara berkembang, kesenjangan kerap terjadi antara level kebijakan dengan implementasinya. Karena begitu kuatnya peran elite dalam politik, berbagai keputusan sering dilanggar di lapangan. Pemihakan terhadap kepentingan mereka jauh lebih menonjol ketimbang konsistensi dalam melaksanakannya. Kedua, dalam konteks Indonesia, bukan hal baru bila pelaksanaan berbeda dengan apa yang secara retorika dinyatakan. Kebijakan dengan mudah dirumuskan, dan biasanya secara retorika relative ideal lagi. Tapi pelaksanaannya sangat tergantung pada individu implementor. Karena berbagai alasan, mulai dari teknis sampai politis, apa yang disebut sebagai diskresi menjadi sebuah pilihan.

Padahal, dalam banyak hal, diskresi tak lebih dari apologi terhadap kesulitan di dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Apalagi bila

tradisi "asal bapak senang" (ABS) masih sangat kuat, maka bukan mustahil bila unsure pelaksana juga sembunyi di balik tradisi tersebut. Ketiga, masyarakat Indonesia makin berani dan terekspose (overexposed) oleh pemberitaan media massa. Keterbukaan pers telah memberi sumbangan yang tidak kecil terhadap penguatan hak-hak rakyat. Tak ada rahasia lagi sekarang. Rancangan UU yang hendak mengatur Rahasia Negara saja sulit dilahirkan dan diterima public. Akibatnya, persepsi masyarakat banyak dibantu oleh informasi yang mereka terima. Makin kuat dan makin banyak bad news tentang Polri, kian tinggi pula mispersepsi mereka terhadap institusi Negara ini.

PERAN MEDIA MASSA

Sejak iklim keterbukaan menjadi bagian dari system politik Indonesia, Negara bukan lagi pemegang hegemoni dalam arus informasi di republic ini. Dulu, Departemen Penerangan menjadi penjaga terdepan dalam mengelola lalu lintas berita di tanah air. Deppen bias melakukan breidel terhadap pers yang dianggap melanggar hukum dan penuh insiniasi, menimbulkan disharmoni social.

Sekarang, ketentuan tersebut, dan bahkan UU subversive juga sudah dicabut. Departemen Penerangan diturunkan statusnya menjadi sebuah kementerian yang mengurus Informatika dan Telekomunikasi. Bahkan di masa Presiden Abdurrahman Wahid, Departemen yang dulu sangat kuat ini, pernah dibubarkan. Artinya, peran Negara dalam urusan informasi makin dikurangi. Dengan dalih informasi menjadi bagian dari HAM, maka tak ada lagi wewenang Negara untuk membatasi hak warga dalam memperoleh informasi yang benar dan menyebarkannya.

Tambah lagi, pers sekarang tak ubahnya sebagai lembaga industry yang mencari keuntungan. Pers

perjuangan sudah menjadi bagian dari sejarah. Yang tinggal kemudian adalah pers sebagai elemen kapitalis dan melindungi kepentingan pemilik modal. Ketika Negara tidak lagi dominan dalam mendanai pembangunan, dan pembayar pajaklah yang menggantikannya, tidak mengherankan bila pers kemudian memiliki logikanya sendiri yang sangat tergantung pada pasar.

Bad news are good news, kini – seolah-olah - telah menjadi jargon industry pers. Kalau anjing menggigit orang, itu sudah biasa. Makanya tidak lagi menjadi berita. Yang menarik untuk dikemas sekarang adalah “orang menggigit anjing”.

Dalam konteks kinerja Polri, bukan berita menarik bila ada anggota Polri yang menjalankan tugasnya. Pers enggan memberitakan seorang anggota Polri yang kepanasan di terik matahari mengatur kemacetan. Atau, pers tak peduli terhadap kesulitan seorang anggota Polri yang dengan berbasah kuyup kedinginan dalam mengurai arus lalu lintas yang sangat padat di jalanan. Hal itu dianggapnya sebagai konsekuensi pekerjaan. Sebaliknya pers akan dengan cepat memberitakan bila ada anggota Polri yang melakukan pungutan liar di jalanan, atau ada korban salah tembak di lapangan. Atas nama HAM, rakyat yang tak berdaya dan tak bersenjata, mesti menyerah kepada anggota Polri

yang bersenjata lengkap. Agak mustahil memang, dan bagaimana jadinya bila ada warga Negara yang lemah harus berhadapan dengan anggota Polri yang bersenjata dan kuat?

Pers, dalam urusan ini, tidak lagi bekerja dalam koridor industry, melainkan pembela HAM. Jadi, pers sekarang memiliki peran makin besar dalam mengawasi proses penegakan hukum, di satu pihak, dan membela rakyat yang tak berdaya, di pihak lain. Dengan demikian, Polri mesti lebih berhati-hati di dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum. Apalagi bila Polri lebih tertarik memproses kasus pidana seorang warga yang mencuri sebutir semangka atau 3 biji buah kakao, atau pula laporan peredaran video porno ketimbang menyelidiki kasus pembobolan Bank Century yang maha dahsyat itu. Niscaya, pers akan terus mengembangkan posisinya sebagai pembela rakyat kecil.

Pers partisan atau bukan, tidak menjadi persoalan betul. Yang pasti, di era HAM sekarang, pers nampaknya mengambil posisi yang demikian.

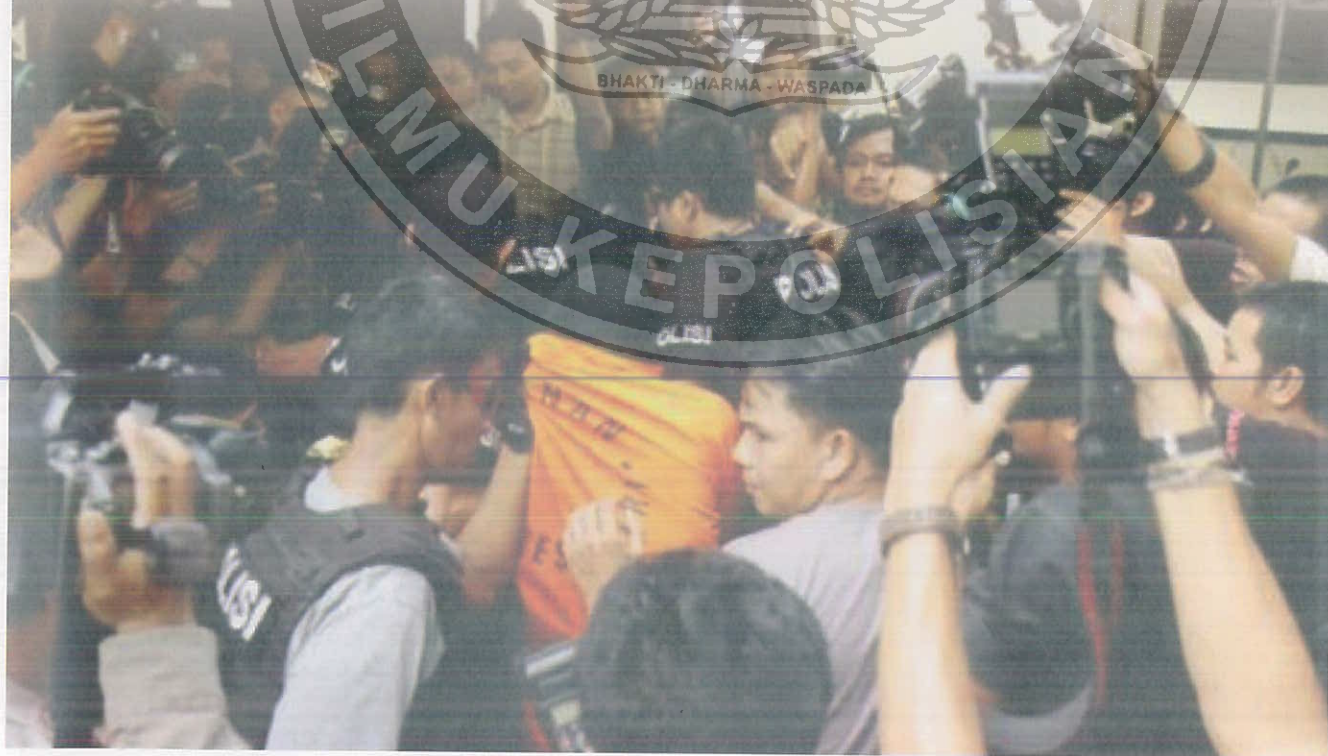
Strategi membangun kepercayaan Bagaimana Polri mesti merespon posisi pers yang demikian? Ada sejumlah strategi yang dapat ditawarkan:

Pertama, buktikan konsistensi Polri di dalam membangun program Trust Building pada khususnya, dan

merealisasikan Grand Strategy nya. Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, senantiasa menekankan pentingnya agenda tersebut dalam berbagai kesempatan. Bahkan, dijanjikan agar tujuan itu jangan hanya dilakukan secara “business as usual” (biasa-biasa saja), melainkan lewat program akselerasi di berbagai kesatuan dan strata. Dengan demikian, selain menjanjikan adanya unsure konsistensi, juga percepatan dalam pelaksanaannya.

Kedua, rakyat akan mempercayai proses penegakan hukum para anggota Polri bila secara empiric mereka tidak melihat lagi rekayasa pembedaan di lapangan. Rakyat akan sangat menghargai Polri bila tak ada lagi anggotanya yang mempersulit atau mempermudah proses pidana, hanya karena pengaruh uang. Atau, masyarakat tidak lagi mendengar berita bahwa ada pihak yang dengan mudah lolos dari proses hukum. Sebaliknya, mereka yang tak memiliki uang, mengalami kesulitan dalam menghadapi perkara.

Ketiga, teladan atasan atau komandan sangat penting artinya bagi penegakan hukum. Kapolri berulang kali mengatakan bahwa sekarang komandan tidak boleh lagi berharap “setoran” dari anak buahnya. Demikian juga di lapangan, komandan harus memberi contoh konkrit kepada bawahannya dalam



melakukan penegakan hukum. Dalam masyarakat yang paternalistic, peran komandan menjadi sangat penting dalam mengarahkan anggotanya.

Keempat, komunikasi politik dengan segala elemen masyarakat dan stake holder menjadi sangat penting. Ini bukan sekedar membangun citra, melainkan mengurangi kesan (mispersepsi) Polri yang arogan karena sudah keluar dari lingkungan TNI dan mempunyai sumber anggaran yang relative mudah, baik dari dalam negeri maupun Negara lain. Juga status Kapolri yang setara dengan anggota kabinet dan mengikuti rapat dengan presiden, masih menjadi bahan perdebatan. Padahal struktur tersebut lahir karena adanya UU No 2/2002 mengenai Polri. Komunikasi politik juga akan membantu berbagai kesulitan yang dihadapi Polri, dalam bentuk sharing informasi. Ini akan mengurangi mispersepsi di atas.

Kelima, berikan insentif (rewards) dan disinsentif (punishment) yang optimal dan konsisten, serta tanpa pandang bulu. Remunerasi yang direncanakan hendaknya segera direalisasi. Yang benar mendapat imbalan, dan tanpa pandang bulu, hukum diterapkan kepada siapa pun yang melanggarnya.

KESIMPULAN

Yang pasti, trust building tidak mungkin dilakukan secara sim salabim, ibarat sulap, semuanya dalam sekejap akan terjadi. Selain reformasi instrumental, structural dan cultural yang diakui memakan waktu, Polri mesti lebih konsisten dalam menegakkan hukum. Soal UU No 2/2002 saja masih banyak yang mempersoalkan, terutama dalam hal posisi Kapolri yang di bawah Presiden.

Juga masalah keamanan, masih diperdebatkan antara mereka yang mendukung UU di atas dengan yang resisten. Dengan demikian, masih perlu di benahi lagi soal reformasi instrumental dan structural ini.

Kedua, sarana dan prasarana, insentif dan disinsentif para penegak hukum yang masuk akal. Mana mungkin anggota Polri bias independen dari kondisi sekitar yang semakin dipengaruhi pikiran-pikiran materialistic serta masyarakat uang (money society).

Ketiga, pola rekrutmen, pendidikan dan penentuan karier yang didasarkan

pada merit system serta kinerja, bukan pavoritism atau KKN. Hal ini akan membawa rasa aman seluruh jajaran Polri dan juga trust building sesama mereka.

Keempat, pers hanyalah pengumpul dan penyebar berita. Kalau pun ada kesan pers lebih membela warga ketimbang Polri, ini dikarenakan kesadaran baru dalam masyarakat yang kian beradab dan mengutamakan kesetaraan dan penegakan hukum. Pers dalam hal ini, tidak mungkin berdiri di belakang Polri yang memang sudah kuat dan didukung Negara.





IKATAN KELUARGA BESAR JAGRATARA

Sekretariat : Komplek Polri Pengadagan Blok C Nomor 24 Jakarta Selatan 12770 Tel/Fax : 021-7991954

Mengucapkan

Selamat & Sukses

ATAS DILANTIKNYA

IRJEN POL DRS. WAHYONO SEBAGAI KABAINTELKAM POLRI

IRJEN POL DRS. TIMUR PRADOPO SEBAGAI KAPOLDA METRO JAYA

BRIGJEN POL DRS. R DADANG GARHADI KARNASAPUTRA SEBAGAI KAPOLDA JAMBI

BRIGJEN POL DRS. SUEDI HUSEIN, SH SEBAGAI KAPOLDA RIAU

BRIGJEN POL DRS. SYAFEI AKSAL SEBAGAI KAKORBRIMOB POLRI

*Selamat mengemban
tugas baru*

